



Anggaran Pilkada Badung Rp 19,6 Miliar

MANGUPURA, NusaBali



AA Gede Raka Nakula

Jelang Pilkada Badung 9 Desember 2015, berbagai persiapan tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Salah satu yang disiapkan, yakni anggaran. KPU Badung telah menerima anggaran sebesar Rp 19,6 miliar dari Pemkab Badung, untuk menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi lima tahun sekali itu. Anggaran tersebut dibutuhkan mengingat logistik Pilkada juga menjadi tanggungan KPU Badung, berbeda

halnya pada saat Pileg dan Pilpres di mana seluruh logistik dikirim dari pusat.

"Kayaknya sih anggaran Rp 19 miliar lebih menciut. Tapi, kami usahakan tetap maksimal," kata Ketua KPU Badung, AA Gede Raka Nakula, Rabu (15/4). Dia merinci garis besar rancangan anggaran dihabiskan untuk keperluan, pertama honorarium dan uang lembur penyelenggara, totalnya Rp 6.281.000.000. Yakni diperuntukkan oleh anggota KPU, PPK, PPS, KPPS, PPDP, tenaga kontrak, dan kelompok kerja. Mengingat lamanya tahapan sekitar sembilan bulan.

Kedua, imbuhan Nakula, untuk pembelian, pengadaan barang dan jasa dengan total Rp 10.187.000.000, rinciannya yakni untuk pembelian barang cetak dan pengadaan, perlengkapan TPS, pendistribusian logistik, pemeliharaan dan BBM, pelayanan administrasi perkantoran (KPU, PPK, PPS, PPDP), pembentukan panitia adhoc, pengamanan, pencetakan dan penyimpanan logistik, sosialisasi, raker/bimtek di PPK, perjalanan dinas, pencalonan, verifikasi calon perseorangan, proses pemungutan dan penghitungan calon, audit dan pengumuman dan kampanye, penetapan calon terpilih, alat peraga kampanye, dan debat publik.

"Total dua kegiatan secara garis besarnya mencapai Rp 16.469.391.700 dari total anggaran yang digelontorkan Pemkab Badung sebesar Rp 19.698.301.000," tandasnya.

Nakula menambahkan, sebagai catatan penyusunan anggaran ini berdasarkan rancangan PKPU. Maka sewaktu-waktu dapat berubah sepanjang ada perbaikan PKPU hasil dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan anggaran. as

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 16



Setelah Hakim, Giliran Jaksa 'Tumbang' di Sela Sidang ✓ **Eks Bupati Tolak Keterangan Saksi Ahli**



• NUSABALI/YUDA

Saksi ahli Iwan Permadi beri keterangan saat persidangan mantan Bupati di Pengadilan Tipikor, Kamis (16/4).



• NUSABALI/YUDA

DENPASAR, NusaBali

Sehari setelah insiden pergantian anggota majelis hakim di tengah persidangan karena jatuh sakit, Kamis (16/4) gantian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi yang 'tumbang' di sela persidangan kasus mantan Bupati Klungkung Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar. Bedanya, sang jaksa tumbang karena diserempet

motor saat sidang diskors. Dalam persidangan kemarin, terdakwa mantan Bupati Candra tolak keterangan saksi ahli.

Musibah kecil yang menimpa JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Suhadi, ini terjadi sesuai Ketua Majelis Hakim, Hasoloan Sianturi, menskors sidang di Pen-

Bersambung ke Hal 15 Kolom 1

Jaksa Suhadi usai diserempet motor di depan Kejati Bali.

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 1 dan 15.



Sambungan.

Eks Bupati Tolak Keterangan Saksi Ahli

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

adilan Tipikor Denpasar, Kamis siang pukul 12.00 Wita. Sidang diskors sejenak untuk istirahat makan siang.

Saat itu, rombongan JPU yang berjumlah 6 orang berencana istirahat di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Jalan Letda Tantular Niti Mandala Denpasar, yang berada tepat di depan Pengadilan Tipikor. Nah, ketika 6 jaksa menyeberang jalan menuju Kejati Bali, maleju sepeda motor dari arah selatan dengan kecepatan cukup tinggi.

Tak pelak, JPU Suhadi yang berada di posisi paling depan langsung disambar motor Honda Vario yang ditunggangi Nurman, pria asal Praya, Lombok Tengah, NTB. Akibatnya, Suhadi dan pengendara motor ini langsung terjungkal di jalan. Lima jaksa lainnya pun segera membantu Suhadi dan pengendara motor yang tergeletak di jalan.

Beruntung, JPU Suhadi yang notabene Kasi Intel Kejari Klungkung tidak mengalami luka serius. Demikian pula pengendara motor yang menyerempetnya, Nurman. "Tadi kepala saya diserempet," tutur Suhadi sambil terus memegang bagian samping kanan kepalanya.

Sementara, pengendara motor, Nurman, mengaku tidak melihat ada orang menyeberang jalan. Pengendara motor yang kesehariannya jualan es di ka-

wasan Niti Mandala Denpasar ini mengaku kaget dan tidak bisa menghindari rombongan jaksa, karena naik motor dalam kondisi ngebut. "Saya tidak lihat orang nyeberang," dalih Nurman sambil memegang kaki dan tangannya yang luka. Kecelakaan itu sendiri langsung diselesaikan secara damai di lokasi.

Meski sempat tumbang karena diserempet motor di jalan, JPU Suhadi tetap bisa melanjutkan tugasnya mengikuti persidangan kasus dugaan korupsi lahan proyek Dermaga Gunaksa, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, Kamis siang. Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung kemarin adalah akademisi bidang Agraria dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Iwan Permadi. Selain itu saksi ahli keuangan negara dari Universitas Patria Makasar, Drs Siswo Dianto. Mantan staf Pemkab Klungkung, Ni Nyoman Setyawati, juga dihadirkan sebagai saksi.

Dalam persidangan sehari sebelumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (15/4), juga dihadirkan saksi ahli dari Unibraw Malang, Drs Adami Chazawi MHum. Kala itu pun diwarnai insiden tumbang salah satu hakim ad hoc, Hartono. Bedanya, Hartono mendadak tumbang saat persidangan baru berjalan 1 jam, tepatnya pukul 10.45 Wita, karena jatuh sakit. Hartono ke-

mudian digantikan hakim ad hoc lainnya, Guntur, setelah sidang sempat diskors 15 menit.

Sementara itu, dalam keterangannya di Pengadilan Tipikor, Kamis kemarin, saksi Iwan Permadi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unibraw, sempat menjelaskan terkait tata cara perhitungan harga tanah yang akan dibebaskan. Dan, perhitungan tersebut wajib dilakukan oleh tim penilai harga tanah yang dibentuk. "Nilai yang diperoleh oleh tim penilai ini adalah harga mati," terang Iwan.

Keterangan Iwan ini bertolak belakang dengan Perpres 36 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Namun Iwan, juga memaparkan dalam Perpres 36/2005 tersebut, salah satu pelaksanaan pengadaan tanah adalah musy-

awarah. Di mana musyawarah disebutkan sebagai proses saling mendengar, saling memberi, dan menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan masalah pengadaaan tanah.

Mantan Bupati Candra yang dimintai tanggapannya oleh majelis hakim terkait keterangan saksi Iwan di persidangan kemarin, pun langsung menolak. Pasalnya, keterangan saksi ahli tidak konsisten. Dalam penjelasan saksi ahli soal Perpres 36/2005, dijelaskan tentang tata cara musyawarah

untuk mencapai kesepakatan harga tanah. Namun, saksi ahli berpatokan pada tim penilai harga tanah yang menyatakan perhitungan tim penilai harga adalah harga mati. "Saya berbeda pendapat dengan saksi ahli," tegas Candra yang didampingi kuasa hukumnya, Wayan Warsa T Bhuna dan Suryatin Lijaya cs.

Sedangkan Siswo Dianto, yang merupakan saksi ahli keuangan negara, menjelaskan bahwa penanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara saat pengadaaan tanah adalah pengguna anggaran (PA) dan dinas terkait. Bupati bisa bertanggung jawab langsung dengan penggunaan anggaran tersebut, jika melakukan intervensi tertulis kepada pengguna anggaran. "Tapi, selama tidak melakukan intervensi apa pun dalam bentuk tertulis, itu semua menjadi tanggung jawab pengguna anggaran, bukan Bupati," tegas Siswo.

Di sisi lain, majelis hakim berencana mempercepat sidang dugaan korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang ini mengingat masa penahanan terdakwa mantan Bupati Klungkung akan habis 3 Mei 2015 depan. Rencananya, dalam sidang lanjutan, Rabu (22/4) depan, JPU akan menghadirkan dua saksi di luar BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Selanjutnya, majelis hakim memberikan hak kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan. rez



Kejari Sita Satu Bendel

Hasil Audit

★ Terkait Dugaan Korupsi Tirta Yatra di Disbud Badung

Penyidik Kejari yang kemarin mendatangi Puspem Badung menemui empat pejabat setingkat kepala dinas untuk menanyakan soal Tirta Yatra ke India.

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar mendatangi Pusat Pemerintahan Pemkab Badung (Mangupraja) pada, Kamis (16/4) untuk mencari bukti terkait dugaan korupsi Tirta Yatra ke Gunung Salak dan India. Bahkan, penyidik mengatakan menemukan beberapa data penting terkait dugaan korupsi tersebut. Satu bendel hasil audit pun disita penyidik.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir mengatakan sudah sempat menemui empat pejabat setingkat kepala dinas saat berkunjung ke Pemkab

Badung. Empat pejabat tersebut, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan Badung IB Anom Bhasma, Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, Kepala Inspektorat Ni Luh Suryaniti dan Kabag Hukum I Komang Budi Argawa. "Waktu saya temui mereka menggunakan pakaian adat karena akan melakukan persembahyangan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, penyidik sempat menanyakan terkait Tirta Yatra ke India yang dijelaskan Kadisbud Badung merupakan dana hibah ke PHDI Badung. Bahkan penggunaan dana tersebut sudah sempat diaudit pada 2014 lalu oleh BPKP dan KPK dalam agenda koordinasi supervisi pencegahan korupsi. "Hasilnya katanya clear. Tapi kami sudah sita satu bendel hasil audit," jelasnya.

Meski demikian, Syahrir menyatakan pihaknya akan tetap melakukan pendalaman terkait temuan ini. Pasalnya, penyidik menemukan beberapa data penting yang tidak sama dengan pernyataan tersebut. Sementara pantauan

NusaBali di kantor Disbud Badung, Kamis (16/4) kemarin sekitar pukul 09.00 Wita, suasananya tampak normal-normal saja. Kepala Disbud Badung, IB Anom Bhasma tak berada di tempat karena sedang melaksanakan upacara *ngayarin* di Pura Besakih, Karangasem.

"Mohon maaf saya kebetulan *ngayarin* di Pura Besakih dan saya sendiri tidak tahu ada info tersebut," kata Bhasma saat coba dikonfirmasi per telepon. Saat disinggung adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam tirta yatra ke India tersebut, pejabat asal Desa Taman, Kecamatan Abiansema, itu menjawab diplomatis. "Tanya saja bagian keuangan," ucapnya singkat. "Sebetulnya itu dana hibah yang dikelola langsung oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung dan tidak ada campur tangan Disbud," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung, I Nyoman Sukada, membenarkan kegiatan tirta



Sambungan -

yatra ke India tersebut. Yang berangkat saat itu, katanya, diikuti oleh sekitar 30 orang terdiri dari para sulinggih dan walaka, dan para pengurus. Tetapi, dia sendiri mengaku tidak ikut pergi pada saat tirta yatra saat itu. "Saya waktu itu ikut dalam rombongan juga ada Pak bupati (AA Gde Agung, red). Tapi tahunnya saya lupa tahun 2010 atau 2011," tutur Sukada mengingat-ingat.

Sayangnya Sukada mengaku lupa berapa anggaran yang dihibahkan, dia beralasan data validnya ada di kantor. Termasuk waktu keberangkatan hari dan bulannya pun Sukada tak hafal. Disinggung mengenai dugaan adanya pelanggaran sampai kemudian dibidik Kejari Denpasar, Sukada mengatakan didengarnya melalui media massa. Tetapi ia sendiri menegaskan di dalam kegiatan tirta yatra ke India sudah sesuai prosedur dan segala anggaran yang dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak ada masalah.

"Pertanggungjawaban anggaran sudah kami berikan tak lama setelah pulang dari India

tahun 2013 lalu. Tidak ada masalah, semua transparan, kepada para sulinggih saya sampaikan anggarannya berapa, semua sampaikan," kata Sukada melalui sambungan telfon.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti mengatakan keganjilan dalam perjalanan tirta yatra ke India sudah diselesaikan. Pihaknya memang mengakui bila Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali pernah memberikan catatan terhadap APBD Badung tahun 2013, salah satunya masalah perjalanan dinas ke India. Tapi hal itu sudah ditindaklanjuti dan sekarang sudah tidak ada masalah lagi.

Untuk diketahui, penilaian proposal pada Dinas Kebudayaan untuk kegiatan tirta yatra ke India pada tahun 2013 sebesar Rp 916 juta dinilai BPKP Provinsi Bali kurang akurat karena persetujuan proposal dengan dana hibah yang disetujui Rp 893.113.500 tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan. **as, rez**

Edisi : Jumat, 17 April 2015 .

Hal : 5



Masalah Anggaran Pilkada Jembrana Teratasi



RAPAT koordinasi antara KPU Bali, KPU Jembrana dan Pemkab Jembrana membahas anggaran Pilkada Jembrana 2015 di Kantor KPU Bali Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar, Kamis (16/4).

DENPASAR, NusaBali

Pilkada serentak 9 Desember 2015 secara serentak dipastikan akan digelar di 6 Kabupaten/Kota di Bali. KPU Jembrana yang sempat cemas karena kekurangan anggaran Pilkada dipastikan ikut di 9 Desember nanti. Kekurangan anggaran di KPU Jembrana teratasi saat rapat dengan KPU Bali, Kamis (16/4) siang di Kantor KPU Bali Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar. Jembrana dipastikan akan masuk dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Rapat antara KPU Bali, KPU Jembrana dan Pemkab Jembrana dipimpin langsung Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi. Dari KPU Jembrana hadir komisioner yang dipimpin langsung Ketua KPU I Gusti Ngurah Agung Darmasanjaya, dan Sekkab Jembrana I Gede Gunadnya. Dalam rapat yang digelar selama kurang lebih 2 jam tersebut kekurangan anggaran Pilkada Jembrana teratasi.

Awalnya KPU Jembrana membutuhkan anggaran Rp 11,4 miliar. Namun baru memiliki anggaran Rp 10,3 miliar. Dalam rapat kemarin akhirnya diputuskan akan diambilkan kekurangannya senilai Rp 1,1 miliar dari APBD Perubahan 2015. "Kita butuhnya Rp 11,4 miliar. Kurang Rp 1,1 miliar. Hari ini sudah disepakati dengan Tim Anggaran Daerah Pemkab Jembrana kekurangan akan diambilkan di APBD Perubahan. Kalau tidak

ada rapat di KPU Bali hari ini (kemarin) mungkin kita juga belum temukan solusi. Hari ini klir persoalan anggaran itu," kata Darmasanjaya.

Lanjut Darmasanjaya nanti tinggal membuat nota kerjasama saja. Akan dibuatkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara KPU dan Pemkab. Menurutnya anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp 11,4 mil-

iar berdasarkan estimasi pelaksanaan Pilkada 1 putaran. "Kan Pilkadaanya memang diatur satu putaran," tegas Darmasanjaya.

Ketua KPU Bali, Raka Sandhi secara terpisah mengatakan perubahan aturan yakni Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pilkada menjadi Undang-Undang 8 Tahun 2015 khususnya pada

pasal 201 Tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, yang menyatakan untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan yang berakhir antara Januari sampai Juni 2016 Pilkadaanya dilaksanakan di Tahun 2015. "Jembrana kenanya di 2015 serentak dengan 5 kabupaten dan kota. Sekarang semuanya sudah klir kerumitan tersebut sudah teratasi," tegas Raka Sandhi.

Raka Sandhi menyebutkan Jembrana diundang khusus karena kabupaten paling barat di Provinsi Bali ini paling terakhir terkena periodisasi terkait pelaksanaan Pilkada dan ada masalah dengan anggaran. "Kalau kabupaten lain persoalan anggarannya tidak rumit ini, karena periodisasinya tidak ada pergeseran," tegas pria asal Desa Yeh Sumbul, Kabupaten Jembrana ini. **nat**

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 16



Winasa Sebut Kasusnya Direkayasa



• NUSABALI/IB DIWANGKAF
MANTAN Bupati Jembrana I Gede Winasa berikan keterangan pers sesuai menjalar pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus SPPD Kepala Daerah Jembrana tahu 2009-2010 di Kejaksaan, Kamis (16/4).

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 7



Sambungan...

Selama melakukan perjalanan dinas, Winasa mengaku hanya tinggal duduk di pesawat yang telah disediakan tiga orang ajudannya. Mengenai kebenaran tiket yang digunakan tidak pernah dicek secara langsung.

NEGARA, NusaBali

Sempat empat kali batal diperiksa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara akhirnya sukses melakukan pemeriksaan perdana terhadap Gede Winasa, Kamis (16/4). Mantan Bupati Jembrana dua periode itu diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas atau SPPD Kepala Daerah Jembrana tahun 2009-2010.

Winasa, menuding kasusnya direkayasa. Ia mengungkapkan beberapa kejanggalan berkaitan penetapan tersangka kepadanya mengenai kasus SPPD tersebut. Terutama mengenai pemalsuan sebanyak 63 tiket pesawat perjalanan yang diusut pihak Kejari Negara. Selama 10 tahun menjabat Bupati Jembrana, ia mengaku tidak pernah berurusan langsung untuk beli tiket pesawat. "Yang beli tiket itu adalah ajudan. *Sing taen meli tiket padidi* (tidak pernah beli tiket sendiri). Jadi kalau ada pemalsuan, siapa yang melakukan pemalsuan? Apakah Pak Winasa atau orang lain?" katanya.

Selama melakukan perjalanan dinas, Winasa mengaku hanya tinggal duduk di pesawat yang telah disediakan tiga orang ajudannya. Mengenai kebenaran tiket yang digunakan, tidak pernah dicek secara langsung, apakah sudah sesuai dengan dokumen pertanggungjawabannya. "Lucunya, semua yang diperiksa mengatakan, semua tiket itu dibeli di Amik. Siapa Amik itu, ternyata karyawan saya di Denpasar. Itu pegawai kantor klinik saya. Lalu kalau beli tiket di Amik, aneh gak?" ungkapnya.

Disinggung mengenai temuan BPK terkait penyelewengan perjalanan dinas yang tidak ditindaklanjuti selama dua tahun hingga masuk ranah pidana, Winasa mengaku tak tahu. "Saya sampai hari ini tidak menerima TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah). Kalau saya merasa menerima, *ne mone ada temuan* (segini ada temuan), tapi tidak pernah

diberikan ke saya hingga hari ini," tegasnya.

Winasa pernah minta penjelasan Bawasda, dikatakan ada mengirim TP-TGR ke rumahnya di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo. Penerimaannya disebutkan adalah tetangganya bernama Dek Wisnu. Paling dirasakan janggal mengenai bukti penerimaan surat yang dikirim melalui ekspedisi. Dalam bukti penerimaan surat itu tercantum nama dan tandatangannya. Sedangkan yang menerima saat itu adalah seorang penjaga malam di rumahnya bernama Pak Sabra alias Kiang Sarba. "Saya jadi bingung. Yang jaga malam, gak mungkin jaga pagi. Kok bisa jaga malam nerima. Sedangkan yang menyerahkan surat kan tidak mungkin malam, pasti pagi, kenapa yang nerima jaga malam. Makanya, *sing ne rekayasa* (tidakkah ini rekayasa). Kalau TP-TGR telat dari dua tahun, memang masuk pidana. Tapi kalau saya tidak dikasi, *apo ke bayah* (apa yang mesti dibayar)," ujarnya.

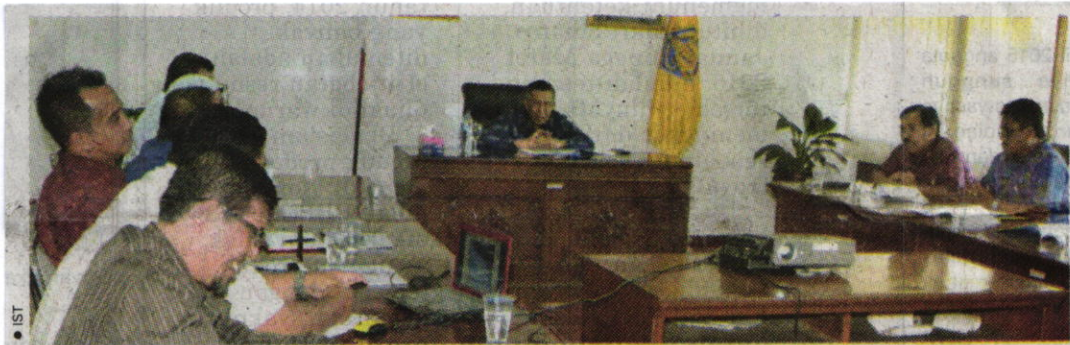
Kasi Pidsus Kejari Negara, Putu Sauca Arimbawa, dikonfirmasi secara terpisah, mengatakan pemeriksaan perdana terhadap Winasa sebagai tersangka untuk membuka keterlibatan tersangka lain dalam kasus SPPD tersebut. Dalam pemeriksaan kemarin Winasa dicecar 28 pertanyaan. Mengenai tuduhan rekayasa keterlibatan Winasa sebagai tersangka dalam kasus tersebut, pihaknya mengatakan, sah-sah saja berkata seperti itu. Pihaknya mengaku sudah memiliki cukup bukti, sehingga menjerat Winasa sebagai tersangka. Salah satunya mengenai Surat Pertanggungjawababn (SPJ) perjalanan dinas yang ditandatangani langsung oleh Winasa. "Dari pemeriksaan ajudan, beli tiket dari Amik. Kemudian Amik mengaku beli tiket dari tiga travel. Pesanan ke Amik itu langsung dari ajudannya," terangnya.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Bupati Jembrana periode 2000-2005 dan 2005-2010 dijemput tim penyidik Kejari Negara ke Lapas Negara. Mobil operasional yang mengangkut Winasa tiba di Kejari Negara dikawal anggota polisi bersenjata tiba sekitar pukul 11.00 Wita. Winasa langsung diajak naik ke lantai II guna menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ari Lestari ini berlangsung tertutup di ruang Pidus. Saat diperiksa, bupati kolekter Muri ini didampingi pengacara yang ditunjuk Kejari Negara yakni I Made Nurbala. Petugas mengakhiri pemeriksaannya sekitar pukul 14.30 Wita. **od**



4 Ruas Jalan Tol Siap Dibangun di Bali

★ Panjang 156,7 Km,
Lintasi 7 Kecamatan
dan 4 Kabupaten



Gubernur Pastika (tengah) saat pihak Waskita Karya presentasikan Jalan Tol, Kamis (16/4).

Ruas yang
dirancang
meliputi Tol Kuta-
Canggu-Tanah
Lot-Soka, Tol
Soka-Pekutatan,
Tol Pekutatan-
Gilimanuk, Tol
Pekutatan-Lovina

DENPASAR, NusaBali

Empat ruas Jalan Tol yang menghubungkan kawasan Bali Selatan dan Bali Utara dengan panjang total 156,7 kilometer direncanakan bakal dibangun di Bali. Ruas Jalan Tol senilai Rp 34,38 triliun yang digagas pihak PT Waskita Karya Tbk ini direncanakan melintasi 7 kecamatan dan 4 kabupaten di Bali (Badung-Tabanan-Jembrana-Buleleng)

Rencana pembangunan empat ruas Jalan Tol yang ditawarkan pihak Waskita Karya ini telah dipresentasikan di hadapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Kantor Gu-

bernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (16/4). Dalam presentasi pra-studi kelayakan jalan Tol, Kamis kemarin, pihak



Sambungan.

RUAS JALAN TOL YANG DITAWARKAN DIBANGUN DI BALI

- **Tol Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka**
 - Melintasi Kecamatan Kuta (Kuta), Kecamatan Kuta Utara (Canggu), Kecamatan Kediri (Tanah Lot), dan Kecamatan Selemadeg (Soka)
 - Panjang ruas Tol 28 kilometer
- **Ruas Tol Soka-Pekutatan**
 - Melintasi Kecamatan Selemadeg (Soka), Kec Pekuatatan (Pekutatan)
 - Panjang ruas Tol 25,1 kilometer
- **Ruas Tol Pekutatan-Gilimanuk**
 - Melintasi Kec Pekutatan (Pekutatan), Kecamatan Melaya (Gilimanuk)
 - Panjang ruas tol 54,4 kilometer
- **Ruas Tol Pekutatan-Lovina**
 - Melintasi Kec Pekutatan (Pekutatan), Kecamatan Seririt di Buleleng (Lovina)
 - Panjang ruas tol 46,7 kilometer

PT Waskita Karya menghadirkan Direktur Operasional I, Desi Arryani, didampingi Konsultan Ahmad Faiz.

Sedangkan Gubernur Made Mangku Pastika, didampingi antara lain, Kepala Bappeda Bali Putu Astawa, Kadis Perhubun-

gan-Informasi-Komunikasi I Ketut Artika, Karo Aset I Ketut Adhiarsa, dan Kadis PU Nyoman Astawa Riyadi. Pihak Waskita Karya memaparkan, empat ruan Jalan Tol yang ditawarkan akan dibangun untuk menghubungkan Bali Selatan dan Bali Utara ini melintasi 7 kecamatan di 4 kabupaten.

Pertama, ruas Jalan Tol Kuta (Kecamatan Kuta, Badung)-Canggu (Kecamatan Kuta Utara, Badung)-Tanah Lot (Kecamatan Kediri, Tabanan)-Soka (Kecamatan Selemadeg, Tabanan). Tol Kuta-Canggu-

Bersambung ke Hal 15 Kolom 1

4 Ruas Jalan Tol Siap Dibangun di Bali

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Tanah Lot-Soka ini panjangnya mencapai 28 kilometer. Kedua, ruas Jalan Tol Soka (Kecamatan Selemadeg, Tabanan)-Pekutatan (Kecamatan Pekutatan, Jembrana). Ruas Tol Soka-Pekutatan ini panjangnya mencapai 25,1 kilometer.

Ketiga, ruas Jalan Tol Pekutatan (Kecamatan Pekutatan, Jembrana)-Gilimanuk (Kecamatan Melaya, Jembrana) yang panjangnya mencapai 54,4 kilometer. Keempat, ruas Jalan Tol Pekutatan (Kecamatan Pekutatan, Jembrana)-Lovina (Kecamatan Seririt, Buleleng) dengan panjang 46,7 kilometer.

Menurut Desi Arryani, gagasan membangun empat ruas Jalan Tol di Bali ini merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi yang merencanakan pembangunan Jalan Tol sepanjang 1.562 kilometer di seluruh Indonesia. Proyek Jalan Tol ribuan kilometer ini dicanangkan Presiden Jokowi rampung hingga 2019 mendatang.

Nah, kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan BUMN yang mampu untuk menjadi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). "Salah satunya adalah PT Waskita Karya (Per-



Sambungan

sero) Tbk," papar Desi yang kini menjabat Direktur Operasional I PT Waskita Karya.

Desi menyebutkan, Bali menjadi salah satu daerah yang dilirik untuk pembangunan Jalan Tol, karena hasil survei menunjukkan kawasan Bali Selatan sudah sangat kredit. Hal ini memicu terjadinya ketimpangan pembangunan antara kawasan selatan dengan bagian lainnya, terutama Bali Utara. Pengembangan Jalan Tol ini menjadi bagian penting dari upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Bali.

Konsultan PT Waskita Karya, Ahmad Faiz, memaparkan empat ruas Jalan Tol sepanjang total 156,7 kilometer yang direncanakan dibangun di Bali ini anggaran sekitar Rp 34,38 triliun. Guna memuluskan rencana pembangunan empat ruas Jalan Tol tersebut, pihaknya sudah melakukan survei untuk melengkapi pra studi kelayakan.

Menurut Faiz, survei antara lain difokuskan pada analisa perkembangan wilayah, proyeksi lalu lintas, pemilihan trase dengan tinjauan aspek lingkungan, biaya dan teknis, perkiraan biaya konstruksi, analisa ekonomi, dan analisa finansial.

Khusus untuk ruas Jalan Tol Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka, pihaknya memberi tiga alternatif trase.

Alternatif trase pertama, yang mengacu pada RTRW. Alternatif trase kedua, yang melewati pantai. Alternatif trase ketiga, dengan memanfaatkan alur sungai. Versi Faiz, alternatif yang melewati sungai mendapat bobot tertinggi. Lagipula, secara ekonomis paling memungkinkan untuk digarap.

"Jika melewati pantai, biayanya mahal dan konstruksi (Jalan Tol) tidak bertahan lama, karena kuatnya arus Samudra Hindia," jelas Faiz. Alternatif trase pertama yang mengacu RTRW, lanjut Faiz, juga terkendala masalah pembebasan lahan, karena melewati kawasan pariwisata Desa Canggu.

Sedangkan untuk tiga ruas Jalan Tol lainnya: Soka-Pekutatan, Pekutatan-Gilimanuk, dan Pekutatan-Lovina, menurut Faiz, relatif lebih mudah dalam menggarapnya, karena tidak melewati jalur padat.

Sementara itu, Gubernur Pastika merespons positif gagasan pihak Waskita Karya untuk membangun empat ruas Jalan Tol di Bali. Menurut

Pastika, wacana peningkatan infrastruktur jalan pada ruas yang ditawarkan, sudah sering dilontarkannya. Karena itu, Pastika menaruh harapan yang sangat besar agar pihak Waskita Karya dapat merealisasikan pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Bali Selatan dan Bali Utara ini.

"Terlebih, Pemprov Bali berencana mengembangkan kawasan Pekutatan (Jembrana) sebagai kota baru. Kebetulan di sana ada lahan Pemprov Bali seluas 1.100 hektare yang saat ini dimanfaatkan sebagai kebun karet," papar Gubernur yang mantan Kapolda Bali dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) berpangkat Komisaris Jenderal Pol (Purn) ini.

Jika empat ruas Jalan Tol yang digagas pihak Waskita Karya ini bisa diwujudkan, Pastika yakin pengembangan kawasan dapat dipercepat dan akan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Pastika juga optimis investasi Jalan Tol ini bernilai ekonomis tinggi. Karena itu, Pastika mengharapkan pihak Waskita Karya serius menggarap dan merealisasikan empat ruas Jalan Tol ini. **nat**